

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA TERHADAP LAUT CHINA SELATAN

Kebijakan luar negeri Filipina dari masa ke masa periode kepemimpinan yang terjadi memiliki dinamika yang bermacam-macam. Dinamika yang terjadi ini terjadi secara terus-menerus yang kemudian menimbulkan perubahan dalam tata kelola pembentukan kebijakan luar negeri yang hendak dibangun dan dicapai dari tiap masa periode kepemimpinan Presiden di Filipina. Pada Bab II, akan dijelaskan kebijakan luar negeri Filipina secara umum. Disamping itu, akan dijelaskan juga sejarah perkembangan kebijakan luar negeri Filipina terkait Laut China Selatan dimulai ketika masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos, dimana pada masa kepemimpinan Presiden Marcos, konflik Laut China Selatan mulai menjadi isu utama dalam konflik luar negeri yang terjadi antara Filipina dengan China hingga masa pemerintahan Presiden Filipina saat ini, Presiden Rodrigo Duterte.

2.1 Kebijakan Luar Negeri Filipina Secara Umum

Kebijakan luar negeri Filipina secara umum memiliki ciri-ciri, yaitu *independent* dan *principle*. Hal ini tertulis dalam Konstitusi Filipina tahun 1987 yang diatur di dalam *Article II* tentang *Declaration of Principles and State Policies Principles* bagian 2 dan *State Policies* bagian 7, yaitu:

(2) *“The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations.”*

(7) *“The State shall pursue an independent foreign policy. In its relations with other states the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination.”* (Constitution, 1987).

Kebijakan luar negeri Filipina secara umum berdasarkan juga kepada 3 (tiga) tujuan. Tiga tujuan kebijakan luar negeri Filipina diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan keamanan nasional;
- b. Untuk meningkatkan diplomasi ekonomi;
- c. Untuk melindungi hak-hak dan mempromosikan kesejahteraan warga Filipina di luar negeri (Constitution, 1987).

Dalam perjalanan kebijakan luar negeri Filipina, terdapat perubahan yang paling terlihat jelas tentang kebijakan luar negerinya, yaitu kebijakan yang semakin 'mendekat' ke China, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses yang semakin kooperatif ini membuat beberapa perubahan dalam arah kebijakan luar negeri yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Perubahan-perubahan tersebut terlihat sangat jelas dan tetap dengan tujuan mempertahankan 3 (tiga) pilar kebijakan luar negeri Filipina.

2.2 Sejarah Perkembangan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terkait Laut China Selatan (LCS)

Sejak Filipina mendeklarasikan kemerdekaan pada 12 Juni 1898, secara konstitusi, Filipina telah memiliki 16 presiden. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN yang lainnya, Filipina memiliki ciri khas sendiri dan berbeda dengan negara ASEAN yang lain. Sebagai satu-satunya negara yang mengalami penjajahan oleh Amerika, Filipina sampai saat ini bergantung kepada banyak bentuk, seperti perdagangan, investasi, kredit, dan bantuan militer pada Amerika Serikat. Filipina merupakan satu-satunya negara yang bergantung pada Amerika Serikat dalam jangka waktu yang panjang.

Bila melihat perbandingan dengan negara ASEAN lainnya, struktur negara Filipina dikategorikan sebagai yang paling di bawah. Hal ini dikarenakan persaingan antar petinggi negara yang sangat kuat, yang kemudian mempengaruhi kepada cara pemeliharaan tata tertib negara dan pelaksanaan kebijakan, termasuk didalamnya tentang pelaksanaan kebijakan luar negeri (Wurfel, 1990, p. 146). Persaingan antarelit ini sedemikian menguat dalam mempengaruhi birokrasi politik luar negeri Filipina, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Contohnya, pada saat Presiden Ramon Magsaysay memiliki kuasa di badan Senat Filipina, hadir oposisi politiknya yang mendapat dukungan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Filipina, León María Guerrero III. Tetapi, di sisi lain, Menteri Luar Negeri Filipina pada saat pemerintahan Presiden Ramon Magsaysay merupakan pendukung setia Presiden Fidel V. Ramos.

Persaingan yang terjadi antar birokrasi ini menyebabkan lambatnya proses pengambilan kebijakan luar negeri di Filipina. Bagi lawan-lawan politik di Senat Filipina, persaingan ini dilakukan memang atas dasar eksploitasi untuk menggalang dukungan politik dalam pencalonan presiden. Ferdinand Marcos misalnya, terpilih sebagai presiden di tengah-tengah perseteruan politiknya dengan Presiden Macapagal (Wurfel, 1990, p. 152). Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand, legitimasi dan stabilitas rezim Ferdinand tergantung pada undang-undang darurat (*martial law*) yang dicanangkan pada tahun 1982 dan mendapat dukungan penuh dari Amerika dalam bidang perdagangan, ekonomi, dan militer. Jika salah satu dari dua pondasi utama rezim Presiden Marcos rusak, pemerintahan Presiden Marcos dipastikan akan runtuh. Logika inilah yang mendasari politik luar negeri Filipina di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos.

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Ferdinand Marcos

Memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat adalah satu dari sekian bangunan utama kebijakan luar negeri pada rezim Ferdinand Marcos. Marcos memiliki usaha dalam membentuk hubungan baik dengan negara-negara beraliran *marxisme* sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dari kalangan intelektual yang kritis terhadap kebijakan anti komunis yang sedemikian erat dijalankan pada pemerintahan Ferdinand Marcos (Noble, Wurfel and Kahin, 1990, p. 181). Pada periode pertama masa jabatan sebagai Presiden Filipina, Ferdinand Marcos mulai membuka hubungan diplomatik dengan negara komunis lainnya seperti Rumania dan Yugoslavia, baik di Asia maupun di Eropa. Bahkan pada tahun 1975, pemerintahan Ferdinand Marcos mulai membuka kedutaan besar Filipina di Beijing, China. Langkah ini merupakan terobosan yang sudah tentu didasari oleh kebijakan presiden Nixon yang berkunjung ke Beijing tahun 1972 (Noble, Wurfel and Kahin, 1990, p. 183).

Kontak dengan China tersebut dianggap menguntungkan bagi Filipina karena China telah berjanji untuk ekspor sebagian minyak yang dimilikinya ke Filipina pada saat pasokan minyak dari Timur Tengah

mengalami pengurangan diakibatkan oleh operasi militer terhadap bangsa Moro di wilayah Filipina Selatan (Noble, Wurfel and Kahin, 1990).

Pada akhir dekade tahun 1970, Presiden Ferdinand Marcos mulai membuat dan menganggap bahwa ASEAN, sebagai organisasi regional, merupakan bagian yang penting dari keberjalanan politik luar negeri Filipina yang selama ini memiliki fokus pada poros Manila – Washington (Noble, Wurfel and Kahin, 1990). Secara perlahan tapi pasti, Presiden Ferdinand Marcos mengapresiasi manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan membuat Filipina masuk menjadi bagian dari ASEAN. Perubahan arah kebijakan luar negeri Filipina ini memberikan pemerintahan Filipina pada masa kepemimpinan Ferdinand Marcos sebuah kesempatan guna menyelesaikan keretakan hubungannya dengan Malaysia dalam isu Sabah. Pertemuan regular dengan negara-negara anggota ASEAN dapat memulihkan ketegangan hubungan dengan Malaysia. Filipina juga mendapatkan manfaat dalam mengatasi kasus Moro karena Indonesia, sebagai negara anggota ASEAN dan juga sebagai negara muslim terbesar dapat memberikan bantuan diplomatik yang diperlukan.

Presiden Ferdinand Marcos kemudian memperbesar hubungan luar negeri dengan negara-negara Islam lain seperti Mesir, Arab Saudi Jordania, dan Khadafi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dengan pemberontak Moro di Filipina Selatan. Libya, Arab Saudi dan Malaysia dikenal sebagai pendukung utama kelompok muslim dalam konflik Mindanao. Hubungan dengan negara-negara muslim tentu sudah mendapat pengarahannya untuk mendapatkan dukungan diplomatik dan juga mendapatkan jaminan pasokan minyak yang sangat diperlukan bagi Filipina.

Dalam konflik Laut China Selatan, Filipina merupakan negara pertama yang melakukan kegiatan strategis di Kawasan ini. Pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos, Filipina mulai melakukan eksplorasi pada daerah Reed Bank, salah satu bagian Kepulauan Spratly. Eksplorasi tersebut telah menghasilkan dengan penemuan sumber gas alam

tahun 1976 di daerah Reed Bank. Kegiatan eksplorasi ini kemudian mendapat protes dari China dan mendesak agar Filipina menghentikan segala aktivitas tersebut di Laut China Selatan (US-EIA, 2013). Tetapi, kondisi ini justru semakin membuat China *geram* dan membuat kondisi konflik menjadi semakin panas dikarenakan Presiden Ferdinand Marcos membentuk Dekrit Presiden tanggal 11 Juni 1978 yang memasukan wilayah Kepulauan Spratly yang dikenal dengan Kelompok Kepulauan Kalayan ke dalam wilayah territorial Filipina (Presidential Decree No. 1596, 1978).

2.2.2 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Corazon C.

Aquino

Presiden Corazon C. Aquino terpilih dikarenakan besarnya dukungan rakyat Filipina kepada istri Senator Benigno Aquino yang menjadi korban kebijakan represif pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Posisi ini menempatkan Aquino sebagai presiden dengan legitimasi dalam negeri yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Presiden Ferdinand Marcos yang lebih banyak mengutamakan menggunakan Undang-Undang Darurat Filipina tahun 1972. Presiden Aquino membuat proses demokratisasi sebagai agenda utama politiknya.

Produk hukum pada awal pemerintahan Presiden Aquino ini menghapus unsur-unsur yang dianggap otoriter yang menjadi penopang utama pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Untuk contoh, konstitusi yang baru melakukan pelarangan penangkapan sewenang-wenang yang menjadi praktik sehari-hari petugas keamanan pada rezim Presiden Ferdinand Marcos.

Presiden Aquino melihat perlawanan yang dilakukan oleh para ‘komunis’ dalam sebuah pandangan baru. Presiden Aquino terus melakukan berbagai usaha pendekatan non-militer dalam menghadapi pemberontakan komunis. Meskipun dari kalangan militer tidak sepakat sepenuhnya dengan pendekatan sipil yang demikian, Presiden Aquino tetap melakukan berbagai usaha agar dapat membebaskan Filipina dari pengaruh gerakan komunisme yang semakin meluas di Filipina. Pendekatan sipil yang dijalankan Presiden

Aquino memiliki pandangan yang tidak sepeham dengan logic dasar militer yang mengedepankan tindakan yang keras dan tegas di dalam upaya melumpuhkan komunisme di Filipina. Sebaliknya, Aquino justru mengutamakan pendekatan moderat dan menghindari pendekatan kekerasan (Fifield, 1951).

Dalam bidang politik, Presiden Corazon Aquino lebih banyak disibukan dengan isu yang berkaitan dengan pangkalan militer Amerika di Filipina (Fifield, 1951). Ketika masa pencalonan diri Presiden Corazon Aquino sebagai presiden, kampanye sebagai cara guna memperluas pendukungan terhadap dirinya, Presiden Corazon Aquino menjanjikan pada kampanyenya bahwa akan menutup basis militer Amerika. Tetapi setelah Presiden Corazon Aquino terpilih secara sah sebagai presiden Filipina, Presiden Aquino melihat kembali janji kampanyenya dan telah menyepakati untuk menunggu berakhirnya perjanjian basis militer yang direncanakan selesai pada tahun 1991.

Kabar lainnya yang hadir dari balik pangkalan militer Amerika Serikat adalah terdapatnya kecurigaan tentang adanya senjata nuklir di dalam pangkalan udara dan laut Amerika Serikat yang menimbulkan kritikan tajam di antara para anggota Senat Filipina. Berbagai macam cara untuk membahas tentang kabar adanya nuklir di pangkalan militer Amerika Serikat ini memiliki akhir yang gagal dikarenakan pihak eksekutif tetap mempertahankan argumennya bahwa permasalahan nuklir ini merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden. Meskipun para anggota Senat Filipina gagal mengangkat isu nuklir di pangkalan militer Amerika Serikat, dari pihak eksekutif tetap aktif melakukan tawar-menawar dengan Washington guna mencapai kesepakatan berkaitan dengan jadwal penarikan pasukan Amerika Serikat dari pangkalan militernya di *Clark Field* dan *Subic Bay* (Wurfel, 1990).

Presiden Corazon Aquino pada 15 April 1998, dalam kunjungannya ke Beijing, menyampaikan pidato nya terkait hubungan bilateral dengan China. Dalam pidato tersebut, Ia mengatakan bahwa hubungan antara China

dan Filipina lebih dari sekedar diplomatik. Presiden Corazon Aquino mencatat berbagai kontribusi yang disampaikan China kepada Filipina dan mengungkapkan rasa terima kasih atas seluruh hal tersebut. Selain itu, dalam permasalahan Laut China Selatan, tanggapan lainnya adalah sebagai berikut:

“Our mutual respect for each other’s sovereignty is further strengthened by a common commitment to the rule of reason and law in the settlement of international disputes. Certainly, with regard to possible conflicting claims on the part of our two countries over certain islands and reefs in the South China Sea, that respect and lawful regard have been consistently maintained.” (Aquino, C.C., 1988)

Dalam pidato tersebut, disampaikan bahwa baik antara China dan Filipina saling menghormati kedaulatan satu dengan yang lainnya dengan komitmen bersama terhadap aturan hukum dalam penyelesaian sengketa internasional. Dengan adanya klaim yang bertentangan di Laut China Selatan, terutama atas pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan, Presiden Corazon Aquino tetap menghormati dan apabila hal tersebut merupakan hal yang sah secara hukum, akan tetap konsisten dipertahankan (Aquino, C. C., 1988).

2.2.3 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Fidel V. Ramos

Permasalahan utama dalam politik luar negeri Filipina berkaitan erat dengan menurunnya kemampuan ketahanan external Filipina sejak mulai menutup pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Filipina pada tahun 1992. Meskipun dari pihak militer melakukan penolakan, supremasi sipil atas militer pasca pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos membuat para Senator Filipina ada di puncak tertinggi di dalam penentuan kebijakan bidang militer. Penolakan dari Senator ini membuat perpanjangan perjanjian pangkalan militer dengan Amerika Serikat, sehingga pasukan Amerika Serikat harus ditarik dari Filipina dan pangkalan militernya harus ditutup. Keadaan seperti ini mempengaruhi kemampuan militer Filipina yang dasarnya lemah, terkhusus ketika mendapatkan ancaman dari luar Filipina (eksternal).

Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan external Filipina mulai terlihat dengan dibuktikannya bahwa terdapat proses pembangunan pangkalan militer China di *Mischief Reef* yang terdapat dalam Kawasan yang secara hukum telah dimiliki oleh Filipina pada pertengahan tahun 1990an. Dalam rangka mengatasi agresivitas China, pemerintahan Presiden Ramos melancarkan bentuk-bentuk kebijakan bilateral dan multilateral untuk memprotes pergerakan yang agresif dari China kepada Filipina. Dalam Deklarasi ASEAN tahun 1992 tentang Laut China Selatan yang ditandatangani di Manila pada 1992, Presiden Ramos memberi peringatan kepada China bahwa harus menghargai segala bentuk deklarasi atau perjanjian yang telah dibuat dalam rangka kepentingan bersama. Presiden Ramos lalu mengirim wartawan dan angkatan laut Filipina untuk melihat dan melaporkan hal yang mereka katakana sebagai pembangunan pangkalan militer yang dibangun oleh China. Pemerintah Filipina dalam hal ini pun melakukan penolakan dalam penyerahan para nelayan China yang ditangkap ketika memasuki wilayah perairan Filipina yang disengketakan hingga antara China dan Filipina menyepakati melakukan penandatanganan perjanjian bilateral (Morada and Collier, 1998, p. 573).

Presiden Fidel V. Ramos mengambil manfaat dari perjanjian multilateral untuk menekan China dalam pertemuan China-ASEAN pada tahun 1995 yang bertempat di Hangzhou, China. Walaupun para wakil dari ASEAN telah memberi peringatan kepada China tentang tindakan sepihaknya di wilayah dekat Filipina, pemerintah China tetap bersikap defensif (Morada and Collier, 1998, p. 574). Keadaan seperti ini semakin memperkuat pendapat para petinggi di Filipina tentang sistem pertahanan external Filipina yang lemah.

2.2.4 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Joseph Estrada

Meskipun Presiden Joseph E. Estrada memenangkan pemilihan umum dengan dukungan suara yang tinggi, pada akhirnya dipaksa untuk turun dari jabatannya sebagai presiden melalui proses *people power* kedua. Presiden Joseph E. Estrada menempatkan Filipina kembali pada perhatian

pemerintah Amerika. Pada masa pemerintahan Joseph E. Estrada, Filipina melakukan penandatanganan kerjasama militer dengan Amerika Serikat dalam bentuk *Visiting Forces Agreement* (VFA) pada akhir era 1900an. Perjanjian ini menimbulkan kemungkinan akan berlangsungnya kerjasama militer antara Amerika Serikat dengan Filipina. Hasil yang didapat dari kerjasama ini adalah meningkatkan rasa percaya diri Filipina dalam menghadapi ancaman militer dari luar negara Filipina (eksternal), terkhusus dari China. Karena kerjasama ini memang membuka kesempatan bagi militer Amerika Serikat untuk memasuki Kawasan Laut China Selatan sebagai bagian dari kerjasama militer antara Filipina dengan Amerika Serikat.

2.2.5 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Gloria

Macapagal-Arroyo

Presiden Gloria Macapagal-Arroyo hadir menggantikan Presiden Joseph E. Estrada yang digulingkan melalui proses *people power* kedua dan menjadikan isu adanya gerakan terorisme sebagai tema sentral politik luar negeri Filipina pada saat itu. Presiden Arroyo hadir pada waktu yang tepat ketika Amerika sedang sibuk menjalankan kampanye anti terorisme. Presiden Arroyo menanggapi secara baik dan hangat pada kampanye Presiden Bush dan oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat mengirim Pasukan Khusus untuk membantu Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dalam menanggulangi terorisme.

Di sisi lainnya, pemerintah Amerika juga membantu militer Filipina dalam bentuk pelatihan militer. Secara lengkap dapat dikatakan bahwa politik luar negeri Presiden Arroyo menempatkan terorisme sebagai tema utama politik luar negeri Filipina pada saat itu sehingga membuka kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat yang diberikan kepada Filipina merupakan alasan untuk menghilangkan kelemahan sistem pertahanan external yang ditimbulkan oleh agresifitas China, terkhusus di Kawasan Laut China Selatan.

2.2.6 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Benigno Aquino

III

Pada masa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III, Amerika Serikat terus memperlihatkan pengaruhnya terhadap Filipina, yaitu pada rentang waktu 2010 – 2016. Meskipun pada pemerintahan sebelumnya terjadi keretakan hubungan, sebagai contoh pada masa pemerintahan Presiden Marcos yang pada saat itu membatalkan *Laurel-Langley Agreement* dikarenakan Filipina mulai membuka hubungan dengan China. Kehadiran China di dalam hubungan dengan Filipina tidak memberikan pengaruh terhadap posisi Amerika Serikat sebagai mitra utama Filipina (Lim, 1999, p. 8).

Hubungan yang terjadi antara China dengan Filipina jmenjarah kepada kondisi yang memanas di masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, di mana antara Filipina dan China terlibat dalam konflik terkait permasalahan Laut China Selatan. Filipina membawa permasalahan Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2014. Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan jika hak eksklusif di Laut Barat Filipina yang merupakan bagian dari Laut China Selatan dimiliki oleh Filipina. Dalam keputusan ini juga dinyatakan bahwa pulau buatan dan eksplorasi minyak Tiongkok adalah tindakan yang melanggar kedaulatan Filipina (BBC Indonesia, 2016).

China pada saat itu memberikan sebuah respon terhadap keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dengan mengeluarkan Buku Putih yang berjudul “*China Adheres to the Position of Settling through Negotiation the Relevant Disputes between China and the Philippines in the South China Sea*”. Buku Putih ini menegaskan tentang hak China di Laut China Selatan dan mengingatkan negara-negara di luar kawasan Laut China Selatan agar menghormati negara- negara yang berada dalam kawasan ini demi terjaganya stabilitas keamanan di Laut China Selatan (Matondang, Natuna Pasca Keputusan Arbitrase Internasional, 2016, p. 11)

2.2.7 Kebijakan Luar Negeri Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte

Hubungan kedua negara antara Filipina dan China dalam problematika yang terjadi antara Filipina dan China di Kawasan Laut China Selatan mengalami perubahan yang sangat signifikan pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte (2016 – sekarang). Dalam pidato Duterte saat pelantikannya mengatakan bahwa, “*Real change, this is the direction of our government*”. Duterte memiliki tekad bahwa akan membawa perubahan di Filipina, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan politik luar negeri Filipina. Dalam hubungan dengan China, Filipina akan bertindak dan bersikap lebih kooperatif dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Filipina sebelum Rodrigo Duterte (Bhaskara, 2016).

Hal ini dapat dilihat melalui upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan yang ditawarkan Filipina dinilai cenderung lebih damai di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Duterte menggunakan cara-cara seperti mempromosikan semangat perdamaian dan kepentingan stabilitas Kawasan, serta hubungan bilateral dengan Tiongkok yang lebih banyak dilakukan dengan cara dialog dan negosiasi. Cara damai tersebut yang diberikan oleh Duterte mendapatkan respon yang positif dari China dengan menyatakan dukungan terhadap pemerintah Filipina (Matondang, Natuna Pasca Keputusan Arbitrase Internasional, 2016, p. 13). Dalam sejarah hubungan antara Filipina dengan China, Presiden Duterte kemudian menjadi harapan baru bagi hubungan baik antara Filipina dengan Tiongkok (Matondang, Natuna Pasca Keputusan Arbitrase Internasional, 2016, p. 14).

2.3 “Nine-Dash Line” dan Klaim China Pada Area Maritim di Laut China Selatan

“Nine-dash line” sendiri memiliki arti yaitu sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China, menggunakan dasar historis, guna melakukan klaim atas wilayah Laut China Selatan. Sembilan garis imajiner tersebut dibuat secara sepihak oleh China tanpa menghiraukan keputusan-keputusan mahkamah internasional dan telah menganggap ini sebagai “klaim historis”. Pada tahun 2013, Presiden Aquino

III telah membawa masalah sengketa Laut China Selatan ini kepada Mahkamah Arbitrase Internasional (Yost, 2013).

Pada 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional mempertimbangkan implikasi dari “Nine-dash Line” China dan apakah China memiliki hak bersejarah (*historical rights*) atas sumber daya di Laut China Selatan di luar batas zona maritim yang berhak untuknya sesuai dengan konvensi. Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa China tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan klaim di wilayah perairan Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan.



Gambar 2. 1 Peta Nine-Dash Line

Sumber: <https://www.thehansindia.com/posts/index/Education-and-Careers/2016-05-23/What-is-nine-dash-line/229814>

Kronologis perseteruan perebutan wilayah di Laut China Selatan:

- 1947 : Republik China (Taiwan - ROC) menetapkan 11 garis putus. Garis putus ini dirancang oleh Republik China (Taiwan) dan saat ini dikenal sebagai 9 garis putus milik China, yang kemudian membentuk klaim kedaulatan China di sebagian besar wilayah Laut China Selatan.
- 1951 : Tepatnya pada Agustus 1951, Zhou menegaskan kedaulatan China atas *Macclesfield Bank* dan Kepulauan Paracel dan Spratly. Pernyataan

Perdana Menteri Zhou ini menegaskan kedaulatan maritim tersebut sebelum negosiasi perjanjian damai San Fransisco.

- 1972 : Badan legislatif Filipina secara resmi menetapkan 53 pulau dan batas laut di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari Provinsi Palawan, Filipina.
- 1978 : Presiden Ferdinand Marcos mengeluarkan dekrit presiden yang mengklaim Kepulauan Kalayan dan Spratly masuk menjadi bagian dari wilayah Filipina.
- 2009 : Badan Legislatif Filipina meratifikasi sistem dasar kepulauan. Dasar kepulauan ini telah menjadi dasar yurisdiksi maritim dan memenuhi kewajiban perjanjian UNCLOS.
- 2013 : Tepatnya pada bulan Januari, dengan menggunakan klausa penyelesaian sengketa UNCLOS, Filipina mengajukan gugatan untuk membatalkan *nine dash line*.
- 2016 : Tepatnya pada bulan Juli, Mahkamah Internasional yang memiliki basis di Den Haag menetapkan sebuah keputusan bahwa Filipina memiliki kedaulatan eksklusif atas Laut Filipina Barat.

Keputusan tersebut berimplikasi juga kepada peta sembilan (9) garis putus atau *nine dash line* China yang dianggap tidak sah secara hukum. Keputusan ini telah ditetapkan pada hasil keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional, pengadilan arbitrase di Den Haag yang memutuskan bahwa klaim China atas hak-hak bersejarah terhadap sumber daya tidak sesuai dengan alokasi hak dan zona maritim yang terperinci dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) (Ridderhof, 2016).

2.4 Konflik Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte

Di dalam permasalahan Laut China Selatan, Filipina terlibat di dalam sengketa perbatasan dengan China. Ketika pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte berjalan, Filipina mengejar kebijakan Laut China Selatan yang bersifat konsiliasi. Ketika Agustus 2016, Rodrigo Duterte mengirim mantan Presiden Filipina, Fidel Ramos ke China guna melakukan restorasi hubungan bilateral antara China dan

Filipina setelah melalui dinamika yang konfliktual ketika pemerintahan Presiden Benigno Aquino III karena Laut China Selatan, dalam Heydarian (2017, p. 18).

Yang menjadi sorotan mengapa hal ini menjadi satu hal yang penting diperhatikan adalah kondisi pasca diputuskannya sengketa ini dan keberpihakan pengadilan terhadap Filipina karena ini akan memberikan peluang munculnya dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika Filipina diterima, ini akan menurunkan nilai tawar Asia Tenggara karena Filipina mengajukannya sendirian, tidak bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sementara setelah keputusan ini yang dibutuhkan adalah solidaritas ASEAN untuk menghadapi situasi yang berkembang. Yang kedua, konsekuensi pasca keputusan ini yang juga dapat menyebabkan kehebohan adalah kalau China betul-betul memiliki sebuah “atraksi” baru pasca keputusan ini dibuat dan dapat diketahui bahwa China secara tegas menolak semua keputusan ini bahkan sebelum pengadilan arbitrase internasional mengeluarkan keputusannya.

Hal tersebut harus diantisipasi oleh negara-negara di Asia Tenggara lainnya. ASEAN, sebagai organisasi regional Kawasan di Asia Tenggara harus menjaga hubungan baik dengan China. Hal ini dikarenakan China dan Asia Tenggara saling memiliki ketergantungan satu dengan lainnya. Yang kedua, bagi beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, juga tidak memiliki kepastian semua negara Asia Tenggara bisa dibawa ke satu sikap yang sama apakah pasti mereka bersikap sama dengan Filipina yang mengajukan syarat sendirian tersebut sebagai suatu hal yang perlu ditinjau kembali. Karena dari awal pengajuan konflik yang dibawa oleh Filipina kepada Mahkamah Arbitrase Internasional berjalan sendirian, tanpa melibatkan bantuan negara lain atau organisasi regional ASEAN itu sendiri.